

Development Of Students' Democratic Values Through Citizenship Education

Pengembangan Nilai-Nilai Demokratis Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Aurakel Grissela¹ Rima Khoirunisa² Tarisha Nailya Dermawan³ Dinda Rizky⁴ Syafira Salsabila Ramadhani⁵ Imam Ghazali⁶

¹⁻⁶Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 23012010247@student.upnjatim.ac.id

Abstract

Citizenship education plays a very significant role in forming national identity, developing unique Indonesian characteristics, instilling a spirit of nationalism, and strengthening feelings of love for the homeland. The main target of this curriculum is to increase individual awareness of their roles and responsibilities as citizens, while exploring the rights and obligations attached to this status. Furthermore, citizenship education also aims to foster critical thinking skills, promote active participation in social activities, support the spread of democratic values, and strengthen intercultural relations. The essence of citizenship education is the delivery of democratic values, such as tolerance, appreciation of freedom of expression, active participation, and respect for diversity. This is an essential foundation for students to internalize democratic values into their daily attitudes and actions. Through a comprehensive citizenship education process, it is hoped that the younger generation can act as agents of change that promote the unity and unity of the Indonesian nation, as well as bringing positive change to society as a whole.

Keywords: *Citizenship Education, Students, democratic values*

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan memegang peran yang sangat signifikan dalam pembentukan identitas nasional, pembangunan karakteristik Indonesia yang unik, penanaman semangat nasionalisme, dan penguatan rasa cinta terhadap tanah air. Sasaran utama dari kurikulum ini adalah untuk menggenjot kesadaran individu akan perannya serta tanggung jawabnya sebagai warga negara, sambil mendalami hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Lebih jauh lagi, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, menggalakkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, mendukung penyebaran nilai-nilai demokratis, dan mempererat hubungan antarbudaya. Essensi dari pendidikan kewarganegaraan adalah penyampian nilai-nilai demokrasi, seperti sikap toleransi, apresiasi terhadap kebebasan berekspresi, partisipasi yang berperan aktif, dan penghormatan terhadap keragaman. Hal ini menjadi pondasi yang esensial bagi mahasiswa untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi tersebut ke dalam sikap dan tindakan mereka sehari-hari. Melalui proses pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif, diharapkan generasi muda dapat berperan sebagai agen perubahan yang memajukan

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta membawa perubahan positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Pendidikan Kewarganegaraan, Mahasiswa, nilai-nilai demokratis*

Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan esensial dalam menentukan kemajuan suatu negara. Di Indonesia, peranan pendidikan sangat krusial untuk mencapai cita-cita menjadi bangsa yang maju dan makmur. Meskipun demikian, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pendidikan di Indonesia. Tantangan tersebut mencakup rendahnya tingkat literasi, adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, serta akses pendidikan yang masih terbatas bagi masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu sumber inspirasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah pendidikan kewarganegaraan (Basri & Hendrawati, 2019).

Pendidikan Kewarganegaraan digunakan sebagai materi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memahami Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya berarti mempelajari tentang identitas nasional, berkembang menjadi individu yang memiliki karakter Indonesia, memupuk semangat nasionalisme, dan mencintai negara Indonesia. Oleh karena itu, individu yang terdidik baik sebagai sarjana maupun profesional dalam konteks masyarakat Indonesia perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang negara ini, menginternalisasi nilai-nilai ke-Indonesiaan, merasakan semangat kebangsaan, dan memiliki kasih sayang terhadap tanah air Indonesia (Hamidah, 2019).

Menurut Zamroni (2001) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan partisipasi demokratis bagi anggota masyarakat. Dengan melibatkan beragam aktivitas, upaya dilakukan untuk memberi pemahaman kepada generasi muda bahwa demokrasi adalah sistem yang paling bertujuan untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak individu dalam struktur sosial.

Secara historis, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia pada awalnya dikelola oleh kelompok gerakan yang bertujuan untuk memupuk kesadaran nasional dan semangat kemerdekaan Indonesia. Dari segi sosial dan budaya, Pendidikan Kewarganegaraan di

Indonesia dijalankan oleh para tokoh masyarakat yang mendorong rasa cinta tanah air dan kesadaran akan identitas bangsa Indonesia. Dari segi politik, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia muncul sebagai respons terhadap persyaratan konstitusi, seperti UUD 1945, dan berbagai kebijakan pemerintah yang sesuai dengan konteks waktu itu. Selama ini, Pendidikan Kewarganegaraan terus beradaptasi dengan perubahan dalam sistem pemerintahan dan tatanan negara serta menghadapi beragam tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Tanuredja (2009) menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu proses pembelajaran yang tidak bisa sekadar menyalin dan mengubah nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dijalankan oleh institusi pendidikan di mana individu mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik untuk memperoleh pengetahuan politik, kesadaran, sikap, efikasi politik, serta partisipasi politik, dan kemampuan untuk membuat keputusan politik secara logis dan menguntungkan bagi masyarakat dan negara.

Meningkatkan aspek-aspek nilai-nilai demokrasi menjadi imperatif yang tidak dapat diabaikan, mengingat esensinya adalah untuk membangun semangat demokrasi yang kuat di kalangan mahasiswa. Harapannya adalah agar mampu membentuk atmosfer yang harmonis dan sejahtera. Lebih dari itu, penting bagi mahasiswa untuk secara berkelanjutan menginternalisasi prinsip-prinsip demokrasi guna secara optimal menjalankan peran mereka sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

Prinsip-prinsip demokrasi mencakup sikap inklusif terhadap perbedaan, menghormati opini beragam, mengakui dan menghargai keragaman di dalam lingkungan pendidikan, kemampuan untuk mengatur diri sendiri tanpa mengganggu orang lain, semangat kebersamaan, kepercayaan diri yang mandiri, serta ketaatan terhadap aturan yang berlaku di lingkungan sekolah (Pandri et al., 2021).

Sangatlah esensial bagi individu yang merupakan anggota suatu negara untuk secara aktif mempraktikkan dan memperjuangkan sikap yang bersifat demokratis dalam berbagai aspek kehidupan sosial, kebangsaan, serta kenegaraan. Dengan demikian, beragam kepentingan, aspirasi, dan sudut pandang yang berbeda-beda dapat dikelola dengan cara yang mampu menciptakan kesepakatan atau kesatuan. Pentingnya menanamkan pemahaman yang mendalam dan akurat terkait konsep demokrasi pada diri setiap individu sejak usia dini tidak

dapat diabaikan, karena hal ini dapat mencegah terjadinya penafsiran yang salah atau keliru dalam masyarakat mengenai makna sebenarnya dari demokrasi. Salah satu metode yang dianggap paling efektif dan efisien dalam mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi kepada masyarakat, baik dalam konteks kehidupan sosial, kebangsaan, maupun kenegaraan, adalah melalui upaya pendidikan.

Pendidikan nilai demokrasi pada mahasiswa tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter mereka. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikannya ke dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Hal ini dilakukan dengan mendorong mahasiswa untuk menggunakan akal sehat mereka dalam memahami nilai-nilai demokrasi dan mengembangkan kemampuan rasionalitas yang sesuai dengan kapasitas mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa dapat mencapai tingkat penalaran moral yang optimal. Berdasarkan uraian di atas jurnal ini memberikan tujuan untuk mengetahui nilai demokrasi mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan. Referensi menggunakan

Metode

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif umumnya tidak berfokus pada penggunaan hipotesis, tetapi lebih kepada penggunaan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab setelah analisis dilakukan. Hal ini bertujuan untuk kemudian dapat menghasilkan kesimpulan atau generalisasi (Suprpto, 2013).

Penelitian kualitatif adalah sebuah studi yang memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan rasional tentang suatu fenomena, dengan mengumpulkan data secara menyeluruh pada berbagai variabel melalui pendekatan naturalistik dalam proses penyelidikan (Suprpto, 2013).

Teknik pengumpulan data

Wawancara yang dilakukan pada mahasiswa akan mengalami wawancara yang menyeluruh untuk mengeksplorasi sudut pandang, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang nilai-nilai demokrasi serta dampak dari program pendidikan kewarganegaraan. Pertemuan tersebut terjadi antara dua entitas, yakni orang yang melakukan wawancara (pewawancara) yang bertanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai (terwawancara) yang memberikan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut (Moleong dan Lexy, 2010).

Observasi dilakukan pengamatan langsung selama kegiatan pembelajaran kewarganegaraan untuk memahami interaksi antara mahasiswa dan proses belajar-mengajar.

Analisis Data

Pengkajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal masuk ke lapangan, terus berlanjut selama masa penelitian di lapangan, hingga tahap penyelesaian studi di lapangan. Dalam proses analisis data, kegiatan meliputi reduksi data, penampilan data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data

Mengurangi informasi merupakan upaya untuk menyusun data secara ringkas dengan memprioritaskan aspek-aspek utama, menitikberatkan pada hal-hal yang signifikan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang mendasarinya.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, informasi dikomunikasikan melalui ringkasan tulisan, diagram, serta keterkaitan antar elemen. Format naratif sering kali menjadi pilihan utama untuk menggambarkan data dalam konteks penelitian kualitatif.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat provisional dan dapat mengalami perubahan apabila terdapat bukti-bukti yang mendukung selama proses pengumpulan data dan tahapan selanjutnya (Sugiyono, 2010).

Pembahasan

Pendidikan kewarganegaraan yang disajikan kepada mahasiswa bertujuan untuk mengilhami kesadaran yang mendalam serta komitmen yang teguh dalam upaya mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai bagian dari komunitas akademik, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjadikan NKRI sebagai lambang kemerdekaan yang harus kita jaga dengan sepenuh hati dan dedikasi yang tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan, yang kerap disebut sebagai civics atau edukasi kewarganegaraan, merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai peran serta tanggung jawabnya sebagai bagian integral dari masyarakat di suatu negara tertentu. Di samping itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa individu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada kedudukannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki beragam tujuan yang penting untuk ditekankan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas analisis kritis terhadap berbagai aspek yang terkait dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk merangsang keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan yang bersifat sosial, kebangsaan, serta dalam proses pembuatan kebijakan negara. Selanjutnya, pendidikan ini juga bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan individu secara positif melalui penanaman nilai-nilai demokratis yang kuat dalam diri mereka. Tak kalah pentingnya, tujuan keempat adalah memberikan kesempatan kepada individu untuk berinteraksi dengan masyarakat global, memperkuat jejaring sosial dan meningkatkan pemahaman akan keberagaman budaya di seluruh dunia (Priyanto, 2005).

Sementara itu, tujuan utama dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memfasilitasi proses pembentukan individu menjadi anggota masyarakat yang sadar, berpengetahuan luas, serta memiliki kompetensi dan karakter yang kuat, yang secara konsisten mendukung dan memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui upaya ini, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan dalam diri setiap warga negara kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap

negara, serta mendorong adopsi perilaku yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan hukum yang diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yang mengikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada umumnya, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengadopsi pendekatan pembelajaran kontekstual yang mencakup beragam metode, seperti konstruktivisme, inkuiri, penggunaan pertanyaan sebagai sarana pembelajaran, pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar, teknik pemodelan, proses refleksi, dan penerapan penilaian otentik (Priyanto, 2005).

Menurut Sumarsono (2007) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membentuk sikap mental yang cerdas serta bertanggung jawab pada mahasiswa, yang tercermin dalam beragam perilaku yang meliputi:

1. Memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memahami dan menghayati nilai-nilai filosofis yang menjadi landasan bangsa.
2. Menunjukkan budi pekerti yang mulia, menjaga disiplin dalam berinteraksi sosial, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Bersikap rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang setara dan aktif.
4. Menunjukkan profesionalisme yang mendasar pada kesadaran akan pentingnya pengabdian pada negara dan semangat bela negara.
5. Mengaktifkan diri dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni, demi kepentingan kemanusiaan dan kemajuan negara.

Nilai-Nilai Demokrasi

Nilai dapat didefinisikan sebagai seperangkat standar perilaku yang diyakini dan terintegrasi secara psikologis dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku guru dalam mengajar, seperti kejujuran, transparansi, dan demokrasi, dianggap sebagai nilai. Nilai melekat pada suatu benda, menjadikannya diinginkan dan dicari oleh banyak orang. Nilai suatu benda ditentukan oleh penilaian subjektif yang diberikan oleh individu. Penilaian suatu objek baik atau buruk tergantung pada norma-norma masyarakat dan pengalaman individu yang membuat penilaian.

Menurut pandangan Saiful Arif (2012), esensi dari nilai demokrasi melampaui sekadar kepentingan individu semata, melainkan melibatkan aspek-aspek kehidupan sehari-hari, yang mencakup dinamika dalam lingkup keluarga, institusi pendidikan, dan interaksi sosial di masyarakat. Nilai demokrasi, sebagai fondasi moral, memegang peranan krusial dalam konteks kehidupan berdemokrasi, di mana individu-individu sebagai anggota masyarakat saling berinteraksi dalam menyelesaikan beragam persoalan yang muncul di lingkungan tersebut.

Menurut Zamroni (2001), konsep nilai demokrasi mencakup beragam aspek yang meliputi toleransi terhadap perbedaan pendapat, kebebasan untuk menyuarakan pikiran, penghargaan terhadap keragaman masyarakat, komunikasi yang terbuka, serta kesadaran akan nilai dan martabat kemanusiaan. Selain itu, juga mencakup kemampuan untuk tidak bergantung pada orang lain, saling menghargai, kemampuan untuk mengendalikan diri, memperkuat solidaritas sosial, dan mencapai keseimbangan dalam interaksi sosial. Nilai-nilai ini tidak ditanamkan secara instan pada seseorang, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan partisipasi aktif, toleransi, dan penghargaan terhadap orang lain.

Pendidikan demokrasi diharapkan mampu menghasilkan generasi yang menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan di kalangan penerus bangsa, seperti siswa di tingkat sekolah dasar. Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, keutamaan yang berkaitan dengan kewarganegaraan mencakup perilaku moral dan karakter serta pengabdian yang diperlukan untuk menjaga dan memperkuat kehidupan kewargaan serta pemerintahan yang demokratis (Kalidjernih, 2010).

Menurut Inkeles dalam Cholisin (2013), kepribadian individu yang menunjukkan karakter demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menyambut serta bersikap terbuka terhadap kehadiran dan pandangan orang lain.
2. Menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai pengalaman baru serta ide-ide segar.
3. Menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil.
4. Mengembangkan dan mempraktikkan sikap toleransi terhadap perbedaan.
5. Memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan emosi secara efektif.

Karakter-karakter tersebut dapat melekat kuat dalam diri setiap warga negara Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, agar persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia yang diidealkan dalam sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan. Pendidikan Kewarganegaraan, yang berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, memiliki peran krusial dalam membentuk karakter bangsa, terutama karakter demokratis, sehingga berbagai perselisihan yang pernah muncul di Indonesia, seperti sikap primordial, intoleransi, dan lain sebagainya, dapat diatasi.

Nilai-nilai demokrasi yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, mencakup beberapa aspek berikut:

1. Penghargaan terhadap kesetaraan dan kesederajatan di antara individu;
2. Penghormatan terhadap kebebasan pribadi dan kebebasan berpendapat;
3. Penghargaan terhadap partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; dan

Pengakuan serta penghormatan terhadap keberagaman dan pluralitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Cipto et al. (2002) dalam Tukiran et al. (2017) menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi meliputi :

1. Bebas menyatakan pendapat

Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat merupakan hak yang harus dijamin oleh undang-undang bagi setiap warga negara dalam kerangka sistem politik yang demokratis, seperti yang disebutkan oleh Dahl pada tahun 1971. Selama fase transisi menuju demokrasi saat ini, perubahan-perubahan dalam ranah politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi sering kali menimbulkan beragam persoalan bagi warga negara maupun masyarakat secara keseluruhan.

2. Kebebasan Berkelompok

Mengelompokkan diri dalam suatu entitas organisasi menjadi prinsip fundamental dalam konteks demokrasi yang esensial bagi tiap individu dalam sebuah negara. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam pembentukan entitas seperti organisasi mahasiswa, partai politik, kelompok massa, perusahaan, dan beragam entitas kelompok lainnya adalah suatu kebutuhan yang tak terbantahkan.

Sistem demokrasi memberikan jaminan atas kebebasan individu untuk mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok yang mereka pilih, termasuk tetapi tidak terbatas pada

pembentukan partai politik baru serta memberikan dukungan kepada partai-partai yang sudah ada.

3. Kebebasan Berpartisipasi

Merupakan gabungan antara kebebasan berpendapat dan berkelompok. Terdapat 4 jenis partisipasi yaitu :

- a. Penyuaran suara dalam proses pemungutan suara yang dilakukan dalam konteks pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta proses pemilihan Presiden, merupakan bagian yang penting dan fundamental dari sistem demokrasi.
- b. Suatu bentuk partisipasi yang dikenal sebagai interaksi atau keterlibatan dengan pejabat pemerintah melalui komunikasi atau pertemuan.
- c. Melakukan penolakan terhadap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, masyarakat, atau badan-badan pemerintah merupakan langkah yang penting dalam konteks negara demokrasi guna memperbaiki kinerja sistem politik secara keseluruhan.
- d. Berpartisipasi dalam proses pencalonan untuk berbagai jabatan publik mulai dari level lurah, bupati, walikota, gubernur, anggota DPR/DPRD, hingga presiden, sesuai dengan mekanisme pemilihan yang ditetapkan.

4. Kesenjangan antar Warga

Pentingnya kesetaraan, atau egalitarianisme, dalam memajukan demokrasi di Indonesia tidak dapat dipandang remeh. Prinsip ini menegaskan perlunya memberikan peluang yang sama kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang etnis, bahasa, wilayah, atau kepercayaan agama. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman, baik dari segi etnis, bahasa, wilayah, maupun agama. Namun, keberagaman ini juga dapat menjadi sumber masalah potensial, terutama jika tidak terjadi pemahaman yang baik antara berbagai kelompok, yang dapat mengakibatkan konflik antar-kelompok.

5. Rasa Percaya (Trust)

Keyakinan memiliki peran vital dalam melaksanakan program-program pemerintah. Absennya keyakinan dapat menghambat pemerintah dalam memperoleh dukungan yang

cukup, bahkan berpotensi mengakibatkan pergantian kekuasaan yang tidak tepat waktu, yang pada gilirannya dapat menghambat proses demokrasi. Keharusan akan keyakinan ini mendorong para pemimpin politik untuk saling mempercayai satu sama lain dan juga untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6. Kerja Sama

Kerja bersama sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang timbul dalam masyarakat. Kolaborasi yang dimaksudkan adalah dalam konteks peningkatan kesejahteraan bersama.

Toleransi

Toleransi adalah sikap yang menghormati dan mengutamakan hak-hak setiap individu, termasuk hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka masing-masing, hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, hak untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial di tengah masyarakat, serta berbagai hak-hak lainnya yang dimiliki setiap orang (Rube'I dan Suhaida, 2021).

Menghormati variasi dalam pandangan dan pendapat merupakan aspek penting dalam kehidupan demokrasi. Salah satu ciri utama dari masyarakat yang demokratis adalah kebebasan bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan demokratis, kita harus mampu menghargai dan merangkul keberagaman pendapat yang ada di antara setiap individu.

Memahami serta menyadari keberagaman yang terdapat dalam masyarakat adalah hal yang penting. Dalam kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, salah satu aspek yang harus dihargai adalah keberagaman tersebut. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek seperti ras, suku, dan agama yang ada di masyarakat. Menghormati perbedaan ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan harmonis.

Menghargai keterbukaan dan memuliakan nilai-nilai serta martabat kemanusiaan adalah esensi yang terkandung dalam prinsip-prinsip demokrasi. Kemauan untuk bersikap terbuka serta tekad untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan martabat setiap individu merupakan salah satu fondasi penting dalam menjalankan kehidupan demokratis.

Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan utamanya adalah untuk menginspirasi kesadaran dan komitmen dalam mendukung keseluruhan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai anggota dari komunitas akademik, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam mengadvokasi persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan peran serta dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta memastikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada status sebagai warga negara. Tujuan-tujuan penting dari pendidikan kewarganegaraan mencakup peningkatan kapasitas analisis kritis, keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan, penanaman nilai-nilai demokratis, serta interaksi yang lebih luas dengan masyarakat global.

Nilai-nilai demokrasi meliputi berbagai aspek, seperti toleransi, kebebasan berpendapat, kesetaraan, rasa percaya, kerja sama, dan pengelolaan kontrol diri. Demokrasi tidak hanya mengacu pada kepentingan individu semata, tetapi juga melibatkan dinamika dalam lingkup keluarga, institusi pendidikan, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mencetak generasi yang memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan, seperti penghargaan terhadap kesetaraan, kebebasan pribadi, partisipasi aktif, dan pengakuan terhadap keberagaman.

Toleransi adalah sikap yang menghormati hak-hak setiap individu, termasuk hak untuk menyuarakan pendapat, menjalankan ibadah, dan berinteraksi dalam masyarakat. Menghormati keberagaman dalam pandangan dan pendapat serta mengelola kontrol diri merupakan aspek penting dalam membentuk masyarakat yang demokratis dan harmonis. Keterbukaan, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan semangat kebersamaan adalah nilai-nilai yang mendasar dalam menjalankan kehidupan demokratis.

Referensi

- Astuti, A. 2015. Pengembangan Nilai-nilai Kewarganegaraan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SMA Negeri I Kahu Kabupaten Bone (Doctoral dissertation, FIS)
- Basri, B., & Hendrawati, H. 2019. Pendidikan Hukum Indonesia Yang Berorientasi Pada Nilai-nilai Pancasila Dalam Era Revolusi Industri 4.0. Pelita Bangsa Pelestari Pancasila. <http://jta.ejournal.unri.ac.id:7680/index.php/JPB/article/viewFile/7790/6743id>
- Hamidah, H. 2019. Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. In Forum Paedagogik (Vol. 10, No. 1, pp. 27-39). IAIN Padangsidimpuan.
- Khalidjernih, F. K. 2010. Kamus Studi Kewarganegaraan : Perspektif Sosiologikal dan Politikal. Bandung: Widya Aksara Press.
- Pandri, R., Damayanti, E., Afriani, M., Pratama, R. P., Nurhayati, N., Juneti, J., & Karomi, A. 2021. Pengembangan Nilai-Nilai Demokratis Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education, 2(1), 1-7.
- Priyanto, S. 2005. Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Semarang. FIS UNNES
- Rube'i, M. A., & Suhaida, D. 2021. Penanaman Nilai Demokrasi Dalam mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Program Studi PPKN IKIP PGRI Pontianak. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 97-108.
- Sumarsono. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto 2013. Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Social. Yogyakarta: CAPS(Center for Academic Publishing Service)
- Tukiran, W. N. F., & Abduh, M. Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi dengan Model Pembelajaran Diskusi Kelas. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN, 2598, 5973.
- Tanuredja, Tukiran. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Bandung: Alfabeta.
- Zamroni. 2001. Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan menuju Civil Society, Yogyakarta: Bigraf Publishin.